TAJUK RENCANA

Kontribusi Industri Produk Halal

SEKTOR sektor industri produk halal di Indonesia selama ini ternyata cukup membanggakan. Sektor yang terus berkembang ini telah memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Di masa-masa mendatang, diprediksi prospek industri ini (juga industri keuangan syariah Indonesia) semakin cerah, seiring dengan semakin tingginya kesadaran keberagaman umat Islam Indonesia.

Karena itu tidak berlebihan kalau Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin yakin posisi Indonesia sekarang ini masih sangat mungkin untuk meningkat lagi, bahkan menjadi pemain utama industri keuangan syariah dunia. Sebab, potensi yang dimiliki masih besar.

Saat membuka secara virtual Indonesia Sharia Summit 2021 atau temu pakar dan pelaku ekonomi syariah 'Kemashlahatan untuk Bangkit Bersama' dari Kediaman Resmi Wapres Jakarta, Rabu (22/9). Wapres mengungkapkan potensi-potensi di sektor industri halal. Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan rantai nilai halal/halal value chain (HVC) untuk produk fesyen muslim dan kosmetik halal meningkat. Bahkan pertumbuhan sektor pertanian dan makanan halal, sebagai pendukung utama HVC, berada di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional. Selain itu, nilai ekspor bahan makanan halal Indonesia juga mengalami peningkatan, dari sekitar USD 30 miliar pada 2019 menjadi sekitar USD 34 miliar pada 2020, (KR, Kamis 23/9).

Kiranya, itu baru sebagian saja produk halal yang ada di Indonesia. Potensi lainnya pasti masih lebih banyak lagi. Karena itulah kita perlu terus mengembangkannya dengan berbagai cara. Apalagi dukungan pemerintah juga kuat. Antara lain melalui inisiatif-inisiatif strategis yang telah dan sedang dikembangkan Pemerintah bersama Bank Indonesia serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam penguatan HVC. Inisiatif tersebut berupa penguatan sistem jaminan halal

melalui sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan penetapan kawasan industri halal di Sidoarjo, Jatim; Cikande, Banten; dan Bintan, Kepulauan Riau, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah.

Yang pasti, pasar produk halal memang sangat. Di dalam negeri selain karena mayoritas warga Indonesia beragama Islam, kesadaran mereka dalam menjalankan ajaran agamanya juga meningkat, baik dalam hal pakaian (fesyen), kosmetik, maupun makanan. Sedang kalau produk yang dihasilkan meningkat, pasar luar negeri juga terbuka lebar. Artinya, produk-produk industri halal Indonesia bisa diekspor untuk masuk ke pasar dunia di seluruh negara. Bukan hanya negara-negara Islam, juga ke negara-negara yang tidak berlabel Islam, karena bagaimanapun juga di setiap negara selalu ada warga yang menganut agama Islam.

Salah satu pasar industri halal adalah Saudi Arabia, khususnya di Haramain (Makkah dan Madinah). Kalau tidak dalam suasana pandemi, di dua kota suci ini setiap saat selalu berkumpul ratusan ribu, bahkan jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia, baik untuk melaksanakan umrah maupun rukun Islam kelima pada musim haji. Kita bisa menyaksikan, produk-produk yang dipasarkan sepanjang jalan dari tempat penginapan jemaah sampai masjid (Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi), kebanyakan bukan dari negara berpenduduk mayoritas muslim. Artinya, peluang untuk memasarkan produk kaum muslimin ke sana masih terbuka lebar-lebar, termasuk dari Indonesia.

Karena itulah sekarang perlu dikembangkan banyak entrepreneur-entrepreneur muslim serta industri-industri produk halal. Mereka harus mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dengan harga bersaing. Dengan begitu, maka kontribusi umat Islam dan industri produk halal terhadap perekonomian nasional akan lebih meningkat lagi dan harapan Wapres KH Ma'ruf Amin akan bisa terwujud. Aamiin...! □

Memperkuat Sektor Pertanian

MASIH di tengah suasana pandemic Covid-19, Hari Tani kembali diperingati. Berdasarkan Keppres 169/1963 tentang Hari Tani dinyatakan secara jelas bahwa 24 September 1960 adalah hari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria, yang merupakan hari kemenangan bagi petani. Dan di masa pandemi ini menunjukkan kembali bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tangguh menjadi penopang kehidupan masyarakat luas.

Fakta menunjukkan, di tengah pandemi Covid-19 ini PDB sektor pertanian justru melesat mencapai 16,24 %. Dan lebih dari itu, dibanding sektor yang lain hanya sektor pertanian yang tetap tumbuh positif hingga 2,19 %. Pertumbuhan sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa petani dan sektor pertanian mampu menopang perekonomian nasional (Mahendra, Opini KR 7-9-2020).

Pertanyaan yang mengedepan adalah : apakah sektor pertanian yang sangat terkait dengan agenda reforma agraria (landreform) sudah mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pembangunan?

Mengapa sektor pertanian harus diprioritaskan? Pertama, realitas menunjukkan bahwa petani dan sektor pertanian terbukti lebih tangguh menghadapi krisis. Di saat sektor lain mengalami pertumbuhan negatif, justru sektor pertanian tetap bertahan bahkan mengalami pertumbuhan positif. Kedua, hingga saat ini Indonesia masih sebagai negara agraris, yang penghidupan utama warganya masih mengandalkan dari sektor pertanian.

Ketiga, angka penduduk miskin pada bulan Maret 2021 sebesar 27,54 juta atau 10,14%. Dari jumlah tersebut, angka kemiskinan di perdesaan masih, dominan yakni mencapai 15,37 juta penduduk, atau mencapai 55,81%. Sedangkan angka kemiskinan di perkotaan, sebesar 12,17 juta atau 44,19% (BPS, 2021). Keempat, hingga saat ini kecukupan pangan kita masih menggan-

Sutaryono

KR-JOKO SANTOSO

Amanah

Sudah dua dekade agenda reforma agraria dikundangkan. Tidak seadanya jargon ataupun janji politik, tetapi sudah ditetapkan sebagai amanah bagi penyelenggaraan negara untuk menjalankannya. Amanah tersebut ditetapkan melalui Tap No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Secara tegas bahwa ketentuan tersebut : Menugaskan DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan' (Pasal 6) dan Menugaskan kepada Presiden un-

tuk segera melaksanakan ketentuan tersebut dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan MPR (Pasal 7).

Pada dasarnya tugas untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tentang reforma agraria sudah ditunaikan, yakni melalui Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Sungguh, ini regulasi yang dinanti-nantikan agar agenda reforma agraria bukan hanya sebagai jargon semata, tetapi benar-benar direalisasikan untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara umum dan mengautkan sektor pertanian dan petani secara khusus.

Dalam perkembangannya, reforma agraria mengalami perluasan makna. Tidak sekedar redistribusi tanah, tetapi juga legalisasi aset dan penguatan akses untuk aktifitas produksi. Tidak hanya menasar masyarakat perdesaan sebagai subjek redistribusi tanah, tetapi juga masyarakat perkotaan. Dalam konteks ini, hal yang masih sangat *urgent* dan *emergence* ialah usaha tani, masih menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Restrukturisasi penguasaan tanah dengan skala luas harus segera dilakukan. Agenda redistribusi tanah untuk petani harus didukung oleh semua pemangku kepentingan, baik oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah, NGO, akademisi hingga para pelaku usaha. □

**) Dr Sutaryono, Dosen pada STPN Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirinkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pariwisata Olahraga, Pandemi dan 'Woodball'

DALAM peringatan Hari Olahraga Nasional 2020 setahun silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya perombakan total ekosistem olahraga nasional dan perbaikan tata kelola prestasi olahraga nasional. Salah satu yang menjadi arahan presiden pada saat itu adalah memanfaatkan peluang pengembangan sektor pariwisata olahraga sebagai pendongkrak ekonomi nasional.

Negeri Indonesia yang kaya dengan keindahan alam dan ragam budaya diyakini memiliki potensi besar untuk pengembangan kegiatan pariwisata olahraga. Pariwisata olahraga merupakan kegiatan olahraga yang dikemas dengan cara tertentu untuk mempromosikan wisata (kemenpora.go.id). Segmentasi pariwisata olahraga lebih luas menjangkau semua kalangan mencakup komunitas profesional maupun amatir.

Borobudur Marathon

Sebelum dilanda pandemi, Indonesia telah memiliki beberapa *event* tahunan pariwisata olahraga berskala internasional seperti Maybank Bali Marathon dan Borobudur Marathon. *Event* tersebut berhasil menarik ribuan peserta dari dalam maupun mancanegara. Hadir, berpartisipasi, dan menginap di sekitar tempat penyelenggaraan. Sehingga mendorong ekonomi masyarakat.

Namun, sudah dua tahun ini berbagai *event* pariwisata olahraga terpaksa ditunda dan ditiadakan akibat situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda. Sektor pariwisata menjadi salah-satu yang paling terpuruk dampak pandemi. Seiring kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang mengharuskan semua objek wisata ditutup.

Sektor olahraga juga mengalami hal yang sama dengan beberapa kompetisi olahraga nasional yang dihentikan. Namun, sektor ini perlahan mulai meng-

Agung Widodo – Joko Istiyanto

geliat kembali menyusul diizinkan beberapa *event* besar olahraga seperti kompetisi sepakbola Liga Indonesia dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Tentu saja dengan berbagai prasyarat dan penerapan protokol kesehatan ketat yang harus dipenuhi penyelenggara.

Beberapa pekan lalu, Presiden Jokowi menyatakan persiapan transisi dari masa pandemi ke endemi. Seluruh pihak diminta mulai belajar hidup berdampingan dengan Covid-19. Lebih lanjut, pemerintah akan menyiapkan protokol kesehatan pada enam sektor aktivitas utama meliputi perdagangan, kantor/kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan. Hal ini, tentu saja menjadi angin segar untuk kebangkitan sektor pariwisata olahraga. Perlu digaris bawahi, pelaksanaan *event* pariwisata olahraga di masa transisi tentu saja berbeda dengan penyelenggaraan sebelum pandemi.

Woodball

Salah satu cabang olahraga yang dapat menjadi pilihan adalah *woodball*. Olahraga asal Taiwan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2006 memiliki karakteristik yang sesuai kriteria sebagai olahraga aman di masa transisi pandemi ke endemi. Sehingga layak dijadikan alternatif olahraga pilihan dalam kegiatan pariwisata olahraga. Peralatan yang murah. Olahraga *woodball* ini sepiantas mirip dengan olahraga golf, yang membedakan adalah semua peralatannya terbuat dari kayu. Biaya bermain *woodball* tidaklah setinggi dengan golf. Artinya, jika golf selama ini bersifat elitis, *woodball* relatif bisa dijangkau

semua kalangan.

Peraturan yang mudah. Prinsip permainan *woodball* cukup sederhana. Yaitu bagaimana memukul bola menggunakan 'mallet' (alat pemukul) sehingga masuk ke dalam 'gate' (target). Pemenang adalah yang berhasil memasukkan bola ke dalam *gate* dengan jumlah pukulan paling sedikit.

Integrasi protokol kesehatan. *Woodball* termasuk ke dalam jenis permainan target sehingga tidak ada kontak fisik antarpemainnya. Peralatan yang digunakan pun bersifat individu, setiap pemain menggunakan masing-masing satu *mallet* dan satu bola. Artinya, penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 seperti sangat mungkin diintegrasikan ke dalam olahraga *woodball*.

Layak dicoba sensasi bermain *woodball* dengan pemandangan pegunungan, candi, ataupun pantai yang mempesona.

**) Agung Widodo MOR dan Joko Istiyanto MPd, Sekretaris dan Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran KONI Kabupaten Klaten*

Pojok KR

Atlet DIY mulai kejar medali PON.
-- Doa kami selalu menyertai mereka. ***

Anak di bawah 12 tahun boleh masuk mal.
-- Tetap waspada penularan virus Korona! ***

Petani brambang Bantul perlu uluran tangan.
-- Jangan sampai mereka kian terpuruk.

Berabé

PIKIRAN PEMBACA
Naskah bisa dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/Scan KTP
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Petani Tembakau

MULAI September 2021 sebagian wilayah Indonesia diprediksi sudah memasuki awal musim penghujan. Datangnya musim penghujan dapat menjadi berkah, namun juga perlu diwaspadai jika terlalu berlebihan. Bagi petani tembakau, musim penghujan cukup membuat khawatir karena tembakau yang terkena guyuran hujan jadi sulit kering.

Pada umumnya, tembakau rajang dapat kering dalam kurun waktu sehari, namun karena hujan, proses pengeringan tembakau menjadi terhambat. Para petani tembakau harus rela untuk pergi ke kota dan menambah biaya pengeluaran hanya untuk mengeringkan tembakau. Penyinaran yang minim dari matahari dapat mengakibatkan kualitas tembakau yang dihasilkan menurun, sehingga harga jualnya pun menurun.

Di tengah pandemi yang tak kunjung usai, petani tembakau juga terkena dampaknya karena harga jual tembakau sempat anjlok. Penurunan harga jual tembakau tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilewati oleh petani. Petani harus memutar otak untuk tetap bertahan di tengah kondisi demikian. Petani juga harus bersiap dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Pemkab setempat mengarahkan perusahaan rokok agar membeli tembakau dari petani untuk meng-

antisipasi harga jual yang kurang menguntungkan petani.

Tidak hanya itu, keresahan lain masih menyelubungi petani tembakau karena adanya wacana terkait dengan tarif cukai yang akan naik pada tahun 2022. Wacana tersebut menambah tekanan pada petani tembakau. Jika hal tersebut benar terjadi, serapan panen tembakau dapat berkurang dan petani bisa merugi. Kenyataan di lapangan pun masih menunjukkan bahwa kondisi perekonomian belum stabil karena dampak pandemi. Wacana tersebut banyak dikritisi oleh para petani dan juga perusahaan rokok.

Tapi jika dilihat dari sisi lain, yang sebenarnya lebih meresahkan bagi petani tembakau adalah perhal importasi tembakau. Perusahaan rokok yang justru melakukan impor daun tembakau dapat membuat petani tembakau terancam. Kenaikan biaya cukai rokok dapat berpengaruh terhadap penekanan biaya dari perusahaan rokok, sehingga terdapat kemungkinan bahwa perusahaan rokok lebih memilih untuk melakukan importasi daun tembakau. Apabila hal tersebut dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan, maka keberadaan petani tembakau benar-benar terancam. Keresahan yang dirasakan oleh petani tembakau bak sudah jatuh tertimpa tangga.

**) Fajar Maya Mega Utami, Mahasiswa Fakultas Pertanian UGM.*

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasehat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriza Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo S.Sos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi S.Sos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari S.Sos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrk2@yahoo.com, iklandkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percektakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampasari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarwan, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.